

## Implikasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

Abdullah Kafabih<sup>1\*</sup>, Desi Wahyu Utami<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel Surabaya

Corresponding Author: [abdullahkafabih@uinsa.ac.id](mailto:abdullahkafabih@uinsa.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.447>

### Article Info

#### Article History;

Received:

2024-11-25

Revised:

2024-12-20

Accepted:

2024-12-30

**Abstract:** Kualitas hidup dan kondisi lingkungan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) terhadap kualitas hidup manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Jawa Timur. Dengan menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) PLS. Berdasarkan hasil analisis penggunaan Dana Desa tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM, demikian juga dengan PDRB tidak berpengaruh terhadap IPM. Sementara variabel IPEI berpengaruh signifikan terhadap IPM dan variabel IPM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap IDM. Perubahan status desa pada variabel IDM menjadi indikator adanya perbaikan dan pemerataan pembangunan desa. Pemerintah perlu membuat kerangka pedoman pembangunan, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tiga dimensi utama yakni sosial, ekologi, ekonomi. Partisipasi dan pengawasan berbagai pihak perlu ditingkatkan, untuk mengawal arah kebijakan pemerintah yang mendukung perbaikan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat desa.

**Keyword:** Indeks Desa Membangun; Kualitas Hidup; Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN

Penelitian terkait pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi jumlah kemiskinan (Susilowati et al., 2017)(Bukhari, 2021). Pengaruh ini menunjukkan kontribusi Dana Desa yang cukup efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan terutama di wilayah dengan kontribusi dana desa yang terus bertambah seperti Jawa Timur (Melati & Suryowati, 2018). Namun beberapa penelitian menunjukkan dana desa belum secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa(Robinson Sihombing et al., 2023).

Salah satu indikator lainnya yang digunakan untuk menilai kerangka pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan desa salah satunya yakni Indeks Desa Membangun (IDM), Dana Desa juga belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi lingkungan dan IDM (Halim & Taryani, 2023) (Subekti & Ulfah, 2022). IDM merupakan indeks komposit

Kemendesa PDTT (2023) yang disusun berdasarkan tiga indeks diantaranya adalah (1) Indeks ketahanan sosial (pendidikan, kesehatan, modal sosial, permukiman) (2) Indeks ketahanan ekonomi (keragaman produksi masyarakat, akses pusta perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah) (3) Indeks ketahanan lingkungan (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana).

Klasifikasi desa menurut IDM dibagi menjadi lima kategori yakni (Kemendes, 2024): Mandiri, Maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Dimensi yang lebih luas mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan memiliki dampak bagi pembangunan yang berkelanjutan. Perkembangan kemandirian desa dapat menjadi indikator utama untuk menjadikan desa maju, melalui kajian indikator yang ada dalam IDM. Pengukuran dimensi lingkungan yang mencakup ketersediaan air desa, kemungkinan terjadinya pencemaran sumber air, pencemaran udara, dan pencemaran lingkungan.

Hasil studi lain terkait dampak pengelolaan Dana Desa terhadap ketahanan lingkungan studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menunjukkan bahwa masalah lingkungan belum menjadi isu strategis dalam penentuan pembangunan di level desa. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan belum memperhatikan aspek *sustainability* dan lingkungan (*green budgeting*). Sehingga masalah lingkungan akan menjadi ancaman besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Seperti ancaman bencana alam dan sektor pertanian sebagai perekonomian pokok masyarakat desa (Subekti & Ulfah, 2022).

Penelitian terkait Dana Desa menunjukkan hubungan antara Dana Desa dan status desa di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 14.7% di tahun 2019 dan terjadi kenaikan agregat terhadap status desa. Analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan besaran Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan status desa di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten (Yulitasari & Tyas, 2020) (Dewi & Arif, 2021).

Selain edukasi kepada masyarakat, pembangunan berkelanjutan juga bisa diarahkan melalui *budgeting* yang tepat. Musyawarah desa juga harus dapat menghasilkan keputusan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. “Hasil studi terkait kesediaan untuk membayar peningkatan kualitas lingkungan desa menunjukkan bahwa usia, pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap kesediaan membayar (*willingness to pay*) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan desa-desa wisata di Kabupaten Sleman pasca erupsi Merapi” (Prasetyo & Saptutyningasih, 2013) Perencanaan dan juga kesediaan masyarakat dalam upayanya untuk memperbaiki persoalan lingkungan,

melibatkan kesadaran masyarakat serta pengetahuan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Perbaikan lingkungan permukiman ternyata juga dapat mendorong peran sosial masyarakat dan juga mendorong tumbuhnya ekonomi (Sasongko et al., 2021)

Tingkat kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan suatu daerah. Pelayanan kesehatan yang diukur berdasarkan waktu tempuh ke prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan menjadi poin untuk menilai adanya perbaikan kualitas hidup. Selain itu pengukuran IDM juga memuat adanya unsur kepesertaan BPJS, akses poskesdes, polindes, dan posyandu (Kemendesdes:2023).

Akses pendidikan formal dan non formal, serta akses pengetahuan lainnya seperti taman bacaan masyarakat menjadi poin penting untuk menilai perbaikan kualitas hidup masyarakat. Selain itu penilaian lainnya terkait modal sosial yang dimiliki masyarakat seperti gotong royong, keberadaan ruang publik bagi warga yang tidak berbayar, ketersediaan aktivitas dan fasilitas/lapangan olahraga, toleransi antar warga. Salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia adalah melalui IPM. IPM dapat mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pemerintah khususnya pemerintah desa perlu mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Apakah pembangunan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil.

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan tingkat realisasi Dana Desa paling tinggi di Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan tahun 2023 realisasi Dana Desa di Jawa Timur mencapai 6.73 Triliun. Wilayah ini juga memiliki nilai PDRB yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa. Namun hal ini bersifat kontradiktif dengan nilai IPM di Jawa Timur, jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau jawa, nilai IPM di Jawa Timur memiliki nilai terendah (73.38). Maka perlu dilakukan kajian dampak penyaluran Dana Desa sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembangunan manusia dan lingkungan sebagai bagian evaluasi kebijakan ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang hingga akhir ini perlu dilakukan kajian dan penelitian. Penelitian tersebut mengkaji tentang implikasi penggunaan Dana Desa terhadap perbaikan kondisi lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur, dengan harapan terjadi peningkatan kesadaran dalam proses pembangunan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Data penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, terdiri atas data Indeks Pembangunan Manusia 2023, PDRB, dari Badan Pusat Statistik (BPS), data peringkat status Indeks Desa Membangun 2023 berasal dari Kementerian Desa PDTT, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 2023 dari Bappenas. Lokasi penelitian ini di 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023, lokasi yang dipilih adalah wilayah yang mendapatkan bantuan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh antar variabel, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni *partial least square* yang bertujuan menganalisis pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung antar variabel.

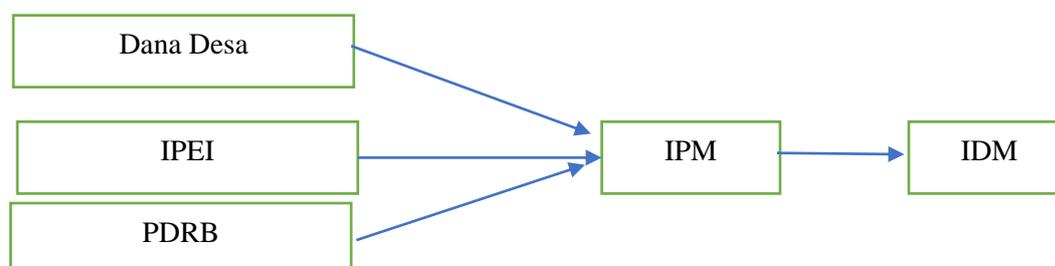
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota yang diukur dengan nilai IPM, variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, Dana Desa, serta Indeks Desa Membangun sebagai variabel Intervening.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, metode yang digunakan adalah *partial least square* (PLS) untuk mengetahui pengaruh langsung dan tak langsung antar variabel. Setiap variabel hanya terdiri atas satu indikator maka analisis yang digunakan adalah uji kesesuaian model ( $R^2$ ,  $Q^2$  dan Goodness of fit) serta uji hipotesis.

Hipotesis penelitian ini yakni

- Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- IPEI berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun

**Gambar 1 Kerangka penelitian**



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 1 memuat gambaran umum hasil penelitian. Dari total 30 kabupaten dan kota, nilai IPM terendah yakni di Kabupaten Sampang 66.19. Sementara Kabupaten yang memiliki nilai IPM tertinggi 81.88 adalah Kabupaten Sidoarjo. Nilai rata-rata IDM di Provinsi Jawa Timur 0.7819 angka ini menunjukkan klasifikasi wilayah pada kategori Desa Maju. Adapun nilai IPEI rata-rata 5.744 dengan nilai minimum 5.2 Kabupaten Sampang, sementara nilai tertinggi 6.3 wilayah Kabupaten Mojokerto. Wilayah dengan nilai PDRB paling tinggi 273698 adalah Kabupaten Sidoarjo, sementara PDRB paling rendah 19491 adalah Kabupaten Pacitan, dengan nilai rata-rata PDRB 64285. Secara rata-rata Dana Desa yang telah disalurkan ke 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2023 berjumlah 265734436, dengan penyeluran nilai paling tinggi adalah Kabupaten Malang dan Kota Batu mendapatkan bantuan Dana Desa paling rendah.

**Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Mean	Stdev	Min	Max
IPM	72.94	3.43506	66.19	81.88
IDM	0.7819	0.04932	0.6992	0.9209
IPEI	5.744	0.23444	5.200	6.300
PDRB	64285	60064.7	19491	273698
Dana Desa	265734436	90240116	20156318	4525328
				71

Sumber: Hasil uji statistik (data diolah)

Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai IDM (0.8770) dan IPM 73.79 yang cukup tinggi, kondisi ini mencerminkan kemajuan pembangunan dan kualitas hidup yang baik. Alokasi Dana Desa sebesar 224,082,023 dengan PDRB 101,296.62, menunjukkan kapasitas ekonomi yang signifikan dibanding wilayah lainnya. Sementara Kabupaten Bangkalan memiliki nilai IDM (0.6999) dan IPM (66.82), ini menunjukkan tingkat pembangunan desa di wilayah ini masih rendah dan kualitas hidup yang perlu ditingkatkan. Dana Desa yang dialokasikan sebesar 304,577,576 dengan PDRB 27,740.03, mencerminkan kapasitas ekonomi yang masih kecil.

**Tabel 2. Uji Goodnes of fit**

Variabel	R square	R Square Adjusted	1-R Square
IPM	0.413	0.392	0.587
IDM	0.757	0.729	0.243
Average	0.585	0.565	0.415
	$(1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2)$		0.528
	$Q^2 = (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2)$		0.472
	$GoF = \sqrt{R^2}$		0.764

Berdasarkan hasil *predictive relevance* ( $Q^2$ ) pada tabel 2. Variabel IDM (0.294) termasuk dalam kategori sedang, sedangkan variabel IPM termasuk dalam kategori tinggi (0.650). Pada uji kecocokan model (*goodnes of fit*) Dana Desa terhadap IPM memiliki nilai (0.18) IPEI ke IPM (1.605) IPM terhadap IDM (0.704) sedangkan variabel PDRB terhadap IPM model yang didapat tidak fit dengan nilai (0.018).

Berdasarkan hasil koefisien determinasi adjusted r square, nilai sebesar 0.392 menunjukkan variasi IPM dapat dijelaskan dengan variabel IDM sebesar 39.2 persen sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. Sementara nilai adjusted r square sebesar 0.729 menunjukkan bahwa variasi IDM dapat dijelaskan oleh variabel IPM, dana desa dan IPEI sebesar 72.9 persen dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. *Goodnes of fir model* dalam penelitian ini cukup tinggi 0.764 ( $Gof > 50$ ), kondisi ini menunjukkan model secara keseluruhan cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

**Tabel 3 Pengaruh Antar Variabel Penelitian**

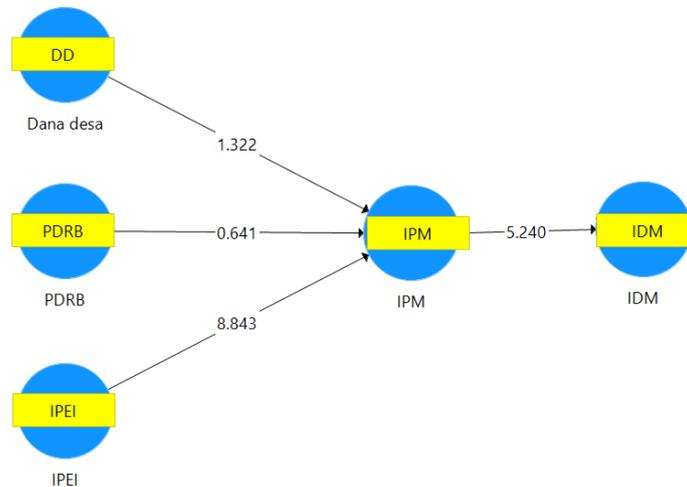
Pengaruh Langsung	Koefisien	T Statistics	P Values
Dana desa -> IPM	-0.261	1.332	0.183
IPEI -> IPM	0.792	8.501	0.000
IPM -> IDM	0.643	5.163	0.000
PDRB -> IPM	0.099	0.638	0.524

Berdasarkan Tabel 2 terdapat pengaruh langsung antar variabel. Variabel Dana Desa tidak berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap IPM, dimana nilai t stat = 1.332, dan nilai signifikansi probabilitas sebesar  $0.183 > \alpha = 0.05$ . Hal ini berarti tidak cukup bukti bahwa dana desa dapat menaikkan atau menurunkan IPM secara langsung dengan asumsi variabel lain konstan.

Variabel IPEI berpengaruh langsung dan signifikan terhadap IPM, dengan nilai t statistics  $8.501 > t_{tabel} = 1.70$  dan nilai signifikansi probabilitasnya sebesar  $0.00 < \alpha = 0.05$ . Kondisi ini berarti kenaikan IPEI 1 poin akan dapat meningkatkan IPM secara langsung sebesar 0.792 poin dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Variabel IPM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap IDM dengan koefisien sebesar 0.643, dengan nilai t statistics sebesar  $5.163 > t_{tabel} = 1.70$  dan nilai signifikansi probabilitas sebesar  $0.000 < \alpha = 0.05$ , artinya kenaikan IPM 1 poin akan dapat menaikkan IDM secara langsung sebesar 0.643 dengan asumsi variabel lain konstan. Variabel PDRB tidak berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap IPM, dengan nilai t statistics = 0.683 dan nilai

signifikansi probabilitas sebesar  $0.524 > \alpha = 0.05$ . Hal ini berarti tidak cukup bukti bahwa PDRB dapat menaikkan atau menurunkan IPM secara langsung.

**Gambar 2 Pengaruh antar variabel penelitian**



### **Pembangunan Desa**

Dana Desa dan regulasi terkait, merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan yang ada di desa dapat dikejar melalui upaya sistematis dari kebijakan yang relevan. Upaya ini menunjukkan dampak positif, selama periode 2018-2019 terdapat penurunan ketimpangan. Tren penurunan ketimpangan ditunjukkan dari penurunan rasio gini pada tahun 2015-2017 mencapai angka 0,40. Penurunan ketimpangan di Jawa timur terjadi pada tahun 2018 menunjukkan angka 0,379 dari rata-rata angka nasional 0,389. (BPS Jawa Timur:2022)

Kebijakan Dana Desa sebagai upaya peningkatan perekonomian desa mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah Dana Desa yang dikucurkan berjumlah Rp. 20,67 Triliun, peningkatan anggaran terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 70 Triliun. Perbedaan anggaran yang diterima oleh masing-masing desa disebabkan karena luas penduduk, jumlah desa Total Dana Desa yang diberikan di provinsi Jawa Timur selama lima tahun dari periode 2018-2022 sebanyak Rp.36.884.433.995.000. Angka ini merupakan akumulasi dari 30 Kabupaten yang menerima Dana Desa.

Kenaikan anggaran Dana Desa juga berdampak terhadap status desa di Jawa Timur, status desa tertinggi yakni desa mandiri naik sebanyak 697 desa. Berdasarkan data IDM Tahun 2021, peningkatan status desa mandiri dan desa maju provinsi Jawa Timur paling tinggi di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan keputusan Kementerian Desa PDTT yang tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021

tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dirilis tanggal 19 Agustus 2021. Berdasarkan klasifikasi data IDM tahun 2021, sebanyak 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah tersebut, 697 desa atau 21,32% berada di Jawa Timur. Capaian ini merupakan angka tertinggi di Indonesia, disusul Provinsi Jawa Barat di posisi kedua dengan jumlah desa mandiri sebanyak 586. Peringkat ketiga adalah provinsi Jawa Tengah dengan total 199 desa mandiri.

Beberapa wilayah seperti Bondowoso dan Probolinggo memiliki potensi dalam pengembangan desa dengan IDM masing-masing 0.7377 dan 0.7465, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam kapasitas ekonomi untuk mengimbangi kualitas hidup masyarakat. Wilayah agraris seperti Jember dan Lumajang memiliki potensi besar di sektor pertanian, didukung oleh Dana Desa yang cukup besar untuk mendorong pembangunan lokal. Keseluruhan data mencerminkan keberagaman keunggulan di Jawa Timur, yang apabila dikelola secara sinergis, dapat mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Perubahan status desa mandiri tertinggi, desa berstatus maju di Jawa Timur juga tercatat dominan secara nasional dengan total 3.283 desa. Menyusul angka tersebut adalah Jawa Tengah dengan total 2.295 desa maju dan Jawa Barat dengan 2.102 desa maju. Pemerataan pembangunan yang positif juga ditunjukkan dengan tidak ada lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. (kominfo.jatimprov.go.id :2021) Kenaikan Dana Desa diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa, dan merubah status desa menjadi desa mandiri. Terdapat beberapa desa yang tidak mendapatkan Dana Desa karena persoalan administrasi dan hukum. Perlu ada kajian lebih lanjut terkait penggunaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terdapat perubahan perkembangan Dana Desa selama periode 2018-2023 di Jawa Timur. Rasio kenaikan jumlah Dana Desa yang diberikan berdampak terhadap peningkatan aktivitas perekonomian yang ada di desa. Kabupaten Sidoarjo misalnya pada tahun 2018 mendapatkan kucuran Dana Desa sebanyak Rp253.643.547.000 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 kenaikan yang signifikan yakni 24,21%. Persentase kenaikan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan sumberdaya manusia.

Prioritas Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lokal desa. Melalui peningkatan Dana Desa diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Melalui pemetaan potensi desa, Dana Desa dapat diprioritaskan dibidang pemberdayaan masyarakat sejalan dengan RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk pembangunan fisik desa yang disetujui oleh perwakilan masyarakat desa dalam Musrenbangdes. Berdasarkan regulasi terkit yakni Permendes No.19 Tahun 2017 bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Terjadi perubahan postur anggaran pada periode pandemi COVID-19. Pemerintah mengupayakan kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena efek pandemi. Salah satunya dengan mennganti mekanisme pengalokasian Dana Desa dimasa pendemi. Dana Desa yang merupakan dana alokasi APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes sebagian disalurkan sebagai bantuan tunai untuk masyarakat.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, kemeterian keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana des tahun anggaran 2020. Dalam rangka penganan pandemi COVID 19/ menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Dana desa tahun anggaran 2020 secara nasional mengalami penurunan dari 72 Triliun menjadi 71,19 Triliun atau turun sebanyak 810 milyar. Penurunan Dana Desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari 662,806 juta menjadi 651,99 juta atau turun 10,87 juta per desa di alokasi dasar masing-masing desa, sehingga TKDD tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 74,57 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus.

### **Kualitas Hidup**

IPM menjadi salah satu indikator yang menjadi determinan kualitas hidup manusia, IPM berfokus pada tiga dimensi utama yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Provinsi Jawa Timur memiliki nilai IPM yang paling rendah (72,75) jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti provinsi Jawa Tengah (72,79) Jawa Barat (73,12), Banten (73,32) DI Yogyakarta (80,64), DKI Jakarta (81,65), pada tahun 2022 nilai IPM Jawa timur yakni 72,75 naik 0.61 poin dari tahun sebelumnya.

Peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Dukungan Dana Desa sebagai salah satu instrumen memberikan peluang naiknya kualitas hidup manusia dari tiga dimensi, seperti perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan akses ekonomi seperti perbaikan akses jalan desa. Perubahan nilai IPM di Jawa Timur pada tahun 2018 hingga 2022 Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 memiliki nilai IDM rata-rata sebesar 0.634. Pada

rentang indeks klasifikasi IDM, nilai ini dikategorikan kedalam status desa berkembang. Pada tahun 2015 di Jawa Timur diidentifikasi terdapat 2262 desa tertinggal atau sebesar 29,3%. Sementara desa sangat tertinggal berjumlah 39 Desa (0,5%) Melalui perbaikan manajemen dan aliran Dana Desa tren pada lima tahun terakhir nilai rata-rata IDM juga mengalami kenaikan positif. Pada tahun 2021 status IDM dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal sudah tidak ditemukan pada semua wilayah Kecamatan di Jawa Timur. Berdasarkan dimensi kualitas lingkungan di Jawa Timur pada tahun 2023 masih banyak terjadi kasus pencemaran air di desa, tanah dan pencemaran udara di desa, serta terdapat sungai yang terkena dampak penbuangan limbah, dengan 143 desa super prioritas, 371 desa prioritas dan 7207 Desa yang sudah memenuhi kriteria bebas dari pencemaran.

## **KESIMPULAN**

Implikasi dana desa terhadap perbaikan kondisi lingkungan menunjukkan angka perbaikan melihat adanya angka penurunan kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan pemerintah desa seperti pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan adanya pemanfaat TPST sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penggunaan ulang, daur ulang, dan pemrosesan akhir sampah. Perbaikan saluran irigasi, dalam mengurangi eksternalitas negatif akibat adanya pembangunan. Perlu adanya prioritas anggaran untuk mengurangi adanya kerusakan lingkungan. Berdasarkan data dari 30 kabupaten/kota di Jawa Timur, setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing dalam aspek pembangunan desa, kualitas hidup, alokasi Dana Desa, dan kapasitas ekonomi. Misalnya, Banyuwangi memiliki IDM tinggi (0.8770) dan PDRB besar (101,296.62), mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Bojonegoro menonjol dengan alokasi Dana Desa tertinggi (395,962,330) dan PDRB yang juga tinggi (97,522.15), mengindikasikan perhatian besar terhadap pengembangan desa dan kapasitas ekonomi yang kuat. Sidoarjo dan Gresik menunjukkan keunggulan ekonomi melalui PDRB yang signifikan, masing-masing mencerminkan peran sebagai pusat industri dan perdagangan di Jawa Timur. Implikasi dana desa terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa belum berpengaruh secara signifikan di Jawa timur. Dana Desa yang disalurkan melalui beberapa prioritas anggaran. Prioritas anggaran untuk penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan. Perbaikan kualitas Sumber daya manusia dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa indikator yang menjadi penentu kualitas hidup manusia terutama indikator sosial dan ekonomi pada indeks desa membangun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Perlu adanya evaluasi dan pengawasan masyarakat terkait penggunaan Dana Desa secara efektif dan efisien, terutama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>
- Dewi, S. S., & Arif, M. (2021). Analysis of the Impact of Village Funds on Regional Development in Klaten Regency. *Repository UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/95305>
- Halim, A., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Melati, P. M., & Suryowati, K. (2018). Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, Dan Random Effect Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 3(1), 41–51. <http://ipm.bps.go.id/>
- Prasetyo, N., & Saptutyningasih, E. (2013). Bagaimana Ketersediaan Untuk Membayar Peningkatan Kualitas Lingkungan Desa Wisata. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 127–136.
- Robinson Sihombing, P., Marsinta Arsani, A., & Purwanti, D. (2023). Apakah Fungsi Belanja APBD Dan Dana Desa Mempengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia? *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Sasongko, I., Annisaa Hamidah Imaduddina, & Widiyanto Hari Subagyo Widodo. (2021). Perbaikan Lingkungan Kampung Kota Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Malang. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 5(1), 117–136. <https://doi.org/10.36040/pawon.v5i1.3237>
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.14710/jiip.v>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83.

<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>

S. B Seran, M. (2021). Value For Money: Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101.

<https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1610>

Sasongko, I., Annisaa Hamidah Imaduddina, & Widiyanto Hari Subagyo Widodo. (2021). Perbaikan Lingkungan Kampung Kota Dalam Mendullokung Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Malang. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 5(1), 117–136.